



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUDI ASTONI
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 494682

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.130.000.000

1. Tanah Seluas 30000 m2 di KAB / KOTA MUSI BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/90 m2 di KAB / KOTA MUSI BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 540 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , WARISAN Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 342.200.000

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000
3. MOBIL, MITSUBITSHI PAJERO SPORT/JEEP Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 248.000.000
4. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 8.440.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 227.236.529**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

Sub Total Rp. 2.707.876.529

III. HUTANG Rp. 83.675.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.624.201.529

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.